

Strategi Tni Angkatan Darat Dalam Menangani Ancaman Separatisme di Papua Melalui Penerapan Pos Depan Taktis Gabungan Dalam Rangka Operasi Kontra Insurgensi

Ananta Yudistia Prabowo¹ Edy Saptono² Gunaryo³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: ananta091115@gmail.com¹

Abstrak

Ancaman separatisme bersenjata di Papua, terutama di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Nduga, menuntut operasi kontra insurgensi yang cepat, terukur, dan tetap membangun dukungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi TNI Angkatan Darat (TNI AD), kendala utama di lapangan, serta penerapan Pos Depan Taktis Gabungan (PDTG) sebagai pola operasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi kasus melalui wawancara, studi dokumen, studi pustaka, dan observasi, kemudian dianalisis dengan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan strategi TNI AD mengarah pada pendekatan Smart Power melalui penindakan selektif berbasis intelijen dan pembinaan teritorial untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. PDTG dinilai membantu mempercepat aliran informasi, memperkuat penguasaan wilayah, dan meningkatkan interoperabilitas antarsatuan. Kendala utama meliputi medan dan cuaca ekstrem, ketergantungan logistik udara dan evakuasi medis, blank spot komunikasi, dilema aturan pelibatan terkait risiko sipil, serta perbedaan protap dan egosektoral. PDTG efektif sebagai simpul integrasi operasi tempur, intelijen, dan teritorial, namun membutuhkan penguatan tata kelola gabungan. Saran yang diperlukan adalah penguatan doktrin dan protap gabungan, latihan terpadu berkala, serta peningkatan sistem komunikasi taktis dan dukungan logistik yang adaptif.

Kata Kunci: TNI Angkatan Darat; Papua; Separatisme; Kontra Insurgensi; Pos Depan Taktis Gabungan (PDTG); Interoperabilitas; Smart Power

Abstract

Armed separatism in Papua, particularly in mountainous areas such as Nduga, requires counterinsurgency operations that are fast, measured, and able to build public support. This study analyzes the Indonesian Army's (TNI AD) strategy, key field constraints, and the implementation of the Joint Tactical Forward Post (PDTG) as an operational approach. A descriptive qualitative case study was applied using interviews, document review, literature study, and observation, analyzed through Miles, Huberman, and Saldana's model. The findings show TNI AD is shifting toward a Smart Power approach by combining selective intelligence driven actions with territorial and civic engagement to strengthen public trust. The PDTG improves information flow, area control, and inter unit interoperability. Major constraints include extreme terrain and weather, reliance on air logistics and medical evacuation, communication blind spots, rules of engagement dilemmas due to civilian risks, and differences in SOPs and inter unit rivalry. PDTG is effective as an integration hub for combat, intelligence, and territorial elements, but requires stronger joint governance. The required recommendations are to strengthen joint doctrine and joint SOPs, conduct regular integrated training, and enhance tactical communication systems as well as adaptive logistics support.

Keywords: Indonesian Army; Papua; Separatism; Counterinsurgency; Joint Tactical Forward Post (PDTG); Interoperability; Smart Power



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Lingkungan strategis global kontemporer ditandai oleh meningkatnya ketidakstabilan geopolitik, persaingan kekuatan besar, serta berkembangnya ancaman non-tradisional,

termasuk insurjensi. Konflik di berbagai kawasan menunjukkan bahwa aktor non-negara semakin mampu memanfaatkan ketimpangan politik, ekonomi, dan sosial untuk memperkuat pengaruhnya, terutama melalui pemanfaatan teknologi dan globalisasi informasi (Cordesman, 2023; Kilcullen, 2022). Perkembangan ini memperluas dimensi konflik modern, di mana insurjensi tidak hanya dilakukan melalui kekerasan bersenjata, tetapi juga melalui perang informasi, propaganda digital, dan serangan siber yang bertujuan mengikis legitimasi negara (Cronin, 2023). Transformasi lingkungan strategis tersebut berkorelasi dengan munculnya pola Perang Generasi Keempat (*Fourth Generation Warfare/4GW*), di mana medan pertempuran tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi meluas ke ranah sosial, politik, dan digital (Hoffman, 2009). Dalam konteks ini, kekuatan asimetris menjadi strategi utama yang digunakan kelompok pemberontak untuk menghadapi kekuatan militer negara yang secara konvensional lebih unggul (Mansoor, 2023). Oleh karena itu, pendekatan militer konvensional dinilai semakin tidak memadai jika tidak diimbangi dengan strategi yang adaptif dan multidimensional. Insurjensi sebagai bentuk ancaman militer kompleks melibatkan kombinasi strategi militer, politik, dan operasi clandestine yang dirancang untuk melemahkan stabilitas pemerintahan yang sah (Kilcullen, 2009). Kelompok pemberontak umumnya memanfaatkan taktik gerilya, disinformasi, infiltrasi sosial, dan dukungan jaringan bawah tanah guna mengimbangi keterbatasan kekuatan mereka (Metz & Millen, 2004; Mao, 1937). Berbagai studi kasus di Afghanistan, Kolombia, dan Timur Tengah menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan insurjensi sangat bergantung pada integrasi antara pendekatan militer, politik, ekonomi, dan sosial (Galula, 1964; Jones, 2008).

Di kawasan Asia dan Asia Tenggara, ancaman insurjensi terus berkembang seiring dengan ketidakstabilan politik domestik, kesenjangan sosial-ekonomi, serta pengaruh ideologi transnasional yang didukung oleh jaringan global (Liow, 2022). Konflik bersenjata di Filipina Selatan, Thailand Selatan, dan Myanmar menunjukkan bahwa insurjensi masih menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas regional (Chalk, 2023). Respons negara-negara di kawasan ini cenderung mengarah pada penerapan operasi militer gabungan yang dikombinasikan dengan pendekatan berbasis komunitas dan kerja sama internasional (Rabasa & Chalk, 2022). Dalam konteks nasional Indonesia, ancaman insurjensi masih menjadi tantangan serius, khususnya di wilayah Papua. Aktivitas kelompok separatis bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) menunjukkan eskalasi ancaman terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil, yang berimplikasi langsung pada stabilitas keamanan nasional (IPAC, 2023). Penyebaran propaganda melalui media digital serta keterbatasan pengawasan wilayah perbatasan semakin memperumit upaya penanganan ancaman ini (Jones, 2023). Data korban konflik bersenjata di Papua menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Korban Konflik di Papua

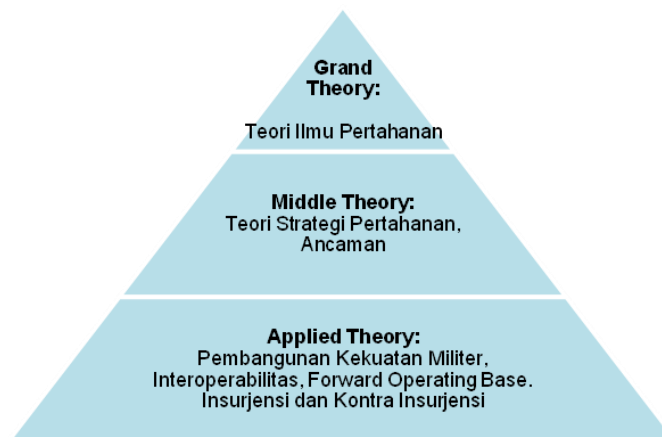
No	Tahun	Jumlah Korban	Keterangan
1	2020	56	14 TNI, 4 Polri, 38 sipil
2	2021	79	30 TNI, 7 Polri, 30 sipil, 12 KKB
3	2022	63	13 TNI & Polri, 46 sipil, 4KKB
4	2023	79	20 TNI, 3 Polri, 37 sipil, 19 KKB
5	2024	122	16 TNI, 11 Polri, 56 sipil, 39 KKB

Sumber: Hasil olahan Peneliti, 2025

Sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), TNI Angkatan Darat memiliki peran strategis dalam menghadapi ancaman insurjensi melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Doktrin Kartika Eka Paksi menekankan pentingnya strategi

pertahanan berlapis, mobilitas tinggi, serta integrasi operasi tempur, teritorial, dan intelijen dalam menghadapi separatisme bersenjata (TNI AD, 2020; Armawi, 2019). Namun, keterbatasan sumber daya, medan operasi yang kompleks, serta tantangan sosial-politik lokal menuntut adanya strategi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan strategis yang relevan dalam operasi kontra-insurgensi adalah penerapan Pos Depan Taktis Gabungan (PDTG). Konsep ini menitikberatkan pada penggelaran kekuatan di titik-titik strategis guna meningkatkan pengendalian wilayah, mempercepat respons terhadap ancaman, serta memperkuat integrasi antar-satuan. PDTG mengadopsi prinsip *Forward Operating Base* yang telah diterapkan secara luas dalam operasi militer modern untuk mendukung efektivitas operasi tempur, intelijen, dan logistik secara terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis strategi TNI Angkatan Darat dalam menangani ancaman separatisme di Papua melalui penerapan Pos Depan Taktis Gabungan dalam rangka operasi kontra-insurgensi.

Tinjauan Pustaka



Gambar 1. Piramida Landasan Teori
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Landasan Teori

Penelitian ini disusun menggunakan piramida landasan teori yang berjenjang, dimulai dari *grand theory* berupa ilmu pertahanan, *middle range theory* yang mencakup strategi, strategi berperang, dan ancaman, hingga *applied theory* yang meliputi pembangunan kekuatan militer, interoperabilitas, konsep *forward operating base* (FOB), serta insurgensi– kontra-insurgensi. Kerangka berjenjang ini digunakan untuk menjelaskan secara sistematis bagaimana strategi TNI Angkatan Darat (TNI AD) dalam menghadapi insurgensi di Papua dirumuskan dan diimplementasikan melalui konsep Pos Depan Taktis Gabungan (PDTG) yang selaras dengan prinsip FOB dan interoperabilitas modern. Secara konseptual, ilmu pertahanan menjadi fondasi utama dalam memahami kebijakan dan strategi negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 menegaskan bahwa pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan semesta dengan TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh sumber daya nasional lainnya (Kemhan, 2015). Dalam konteks damai, ilmu pertahanan juga mengarahkan penguatan daya tangkal melalui sinergi dimensi militer dan nirmiliter ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, psikologi, serta teknologi yang saling berkaitan dalam menjaga ketahanan nasional (Kemhan, 2020). Dengan demikian, ilmu pertahanan berfungsi sebagai payung konseptual untuk merumuskan strategi menghadapi ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida (Supriyatno, 2014; Tippe, 2016).

Pada tataran strategis, strategi pertahanan dipahami sebagai integrasi tujuan (*ends*), cara (*ways*), dan sarana (*means*) dalam mencapai kepentingan nasional. Strategi tidak semata dimaknai sebagai rencana penggunaan kekuatan, tetapi sebagai upaya memperoleh keunggulan dalam kompetisi menghadapi lawan melalui pengelolaan sumber daya secara optimal (Prayitno, Rudiyanto, & Rusdin, 2019). Perspektif ini sejalan dengan pandangan Clausewitz bahwa perang merupakan alat untuk mencapai tujuan politik yang lebih luas, bukan tujuan akhir itu sendiri (Budi & Anwar, 2021; Moran, 2002). Kerangka *ends, ways, dan means* kemudian menempatkan strategi sebagai kombinasi seni dan ilmu dalam menyelaraskan tujuan, metode, dan sumber daya agar tetap konsisten dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis (Thomas, 2022). Perkembangan lingkungan strategis modern menuntut strategi berperang yang tidak lagi bersifat semata-mata militeristik. Ancaman yang bersifat multidimensional baik yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*) menuntut integrasi dimensi militer dan nonmiliter dalam satu desain strategis yang komprehensif (Prayitno, Rudiyanto, & Rusdin, 2019). Dalam konteks ini, strategi berperang juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia prajurit, modernisasi alutsista, penguatan sistem informasi dan siber, serta integrasi komando dan dukungan nonmiliter. Pendekatan ini relevan dengan operasi kontra-insurgensi yang tidak dapat mengandalkan daya tempur semata, melainkan membutuhkan keunggulan informasi, legitimasi sosial, dan kesinambungan logistik.

Konsep ancaman dalam kebijakan pertahanan Indonesia merujuk pada setiap upaya yang berpotensi membahayakan keselamatan bangsa, kedaulatan negara, dan keutuhan wilayah, baik yang bersumber dari aktor negara maupun nonnegara (UU No. 17 Tahun 2011). Ancaman diklasifikasikan menjadi ancaman nyata seperti separatisme bersenjata dan terorisme—serta ancaman belum nyata yang probabilitasnya lebih kecil tetapi tetap harus diantisipasi (Menteri Pertahanan RI, 2015). Dalam konteks Papua, insurgensi bersenjata menempati kategori ancaman nyata yang menuntut prioritas strategi dan penataan kekuatan secara khusus. Menjawab ancaman tersebut, pembangunan kekuatan militer menjadi aspek krusial dalam memperkuat postur pertahanan. Pembangunan ini mencakup modernisasi alutsista, peningkatan kualitas personel, penataan organisasi, serta penguatan dukungan logistik dan industri pertahanan. Konsep *The Four Pillars of Total Combat Capability—readiness, sustainability, modernization, dan force structure* menjadi kerangka analitis untuk menilai kesiapan dan daya tahan kekuatan militer. Pilar-pilar tersebut diperkuat oleh kepemimpinan, moral, dan doktrin sebagai elemen yang menentukan efektivitas tempur di lapangan. Dalam kerangka operasi modern, interoperabilitas menjadi prasyarat utama keberhasilan operasi gabungan. Interoperabilitas dipahami sebagai kemampuan satuan dan sistem untuk bekerja secara terpadu melalui keselarasan prosedur, doktrin, peralatan, pelatihan, serta pertukaran informasi (Greenbaum et al., 1991). NATO menegaskan interoperabilitas sebagai kemampuan organisasi militer untuk melaksanakan *joint operations* secara efektif (NATO, 2006). Dengan demikian, interoperabilitas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kognitif dan organisasional, karena menuntut pemahaman bersama serta kepercayaan lintas satuan (Kim & McDaniel, 2020). Dalam konteks operasional, konsep *Forward Operating Base* (FOB) menjadi rujukan penting bagi penempatan kekuatan di wilayah konflik. FOB merupakan pangkalan depan yang dibangun dekat area operasi untuk mendukung fungsi logistik, komando, dan penempatan pasukan, sehingga memperluas jangkauan operasi dan meningkatkan kontrol wilayah. Dibandingkan *Main Operating Base* (MOB), FOB bersifat lebih kecil, fleksibel, dan berorientasi taktis. Perbedaan karakteristik tersebut dirangkum pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perbedaan FOB dengan MOB

No	Fitur	<i>Forward Operating Base (FOB)</i>	Main Operating Base/MOB
1	Ukuran	Lebih kecil dan sementara	Lebih besar dan permanen
2	Fungsi	Mendukung operasi taktis di garis depan	Pusat dukungan logistik dan personel
3	Keamanan	Bervariasi, sederhana, kompleks	Lebih aman dan terlindungi
4	Lokasi	Lebih dekat dengan area operasi	Lebih aman dan strategis
5	Durasi	Lebih singkat	Lebih lama

Sumber: U.S. Department of Defense. (2010)

FOB memiliki keterkaitan erat dengan dinamika insurjensi dan kontra-insurjensi. Insurjensi dipahami sebagai perlawanan bersenjata terhadap pemerintah yang sah dengan karakter kekerasan asimetris, memanfaatkan medan kompleks, propaganda, dan dukungan sosial-politik (Metz & Millen, 2004). Sebaliknya, kontra-insurjensi merupakan strategi komprehensif yang menggabungkan tindakan militer dan nonmiliter untuk mengisolasi, melemahkan, dan mengakhiri pemberontakan. Kontra-insurjensi yang efektif menuntut pemahaman konteks sosial-budaya, kepatuhan pada hukum, serta orientasi politik yang jelas, termasuk rekonstruksi pasca-operasi. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan operasi kontra-insurjensi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian doktrin, adaptasi strategi, interoperabilitas, dan konteks sosial-politik wilayah konflik. Sejumlah studi internasional menegaskan pentingnya doktrin dan penyesuaian organisasi militer, namun umumnya masih bersifat umum atau berangkat dari pengalaman negara lain (Bulloch, 1996; Foster, 2005; Finlan et al., 2021; Bala & Tar, 2021). Dalam konteks Indonesia, khususnya Papua, penelitian terdahulu lebih banyak menekankan pendekatan nonmiliter dan keamanan manusia, sementara pembahasan strategi taktis-operasional militer masih terbatas (Andani & Alsodiq, 2022; Prameswari & Husna, 2022; Kurnianto et al., 2022). Studi mengenai FOB dan COIN juga umumnya berangkat dari konteks negara lain dan belum sepenuhnya merefleksikan karakter medan Papua (Piatakov & Kodzoev, 2023; Miranda, 2023; Mella et al., 2023). Dengan demikian, terdapat celah penelitian pada aspek implementatif, khususnya integrasi konsep FOB dan interoperabilitas dalam penerapan Pos Depan Taktis Gabungan (PDTG) sebagai instrumen taktis-operasional TNI Angkatan Darat dalam operasi kontra-insurjensi di Papua. Celah inilah yang menjadi dasar konseptual penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk mendalami strategi TNI Angkatan Darat dalam menangani ancaman separatisme di Papua melalui penerapan Pos Depan Taktis Gabungan (PDTG) dalam operasi kontra-insurjensi. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap fenomena strategis dan operasional yang kompleks, khususnya berdasarkan pengalaman langsung para pelaku di lapangan serta dinamika lingkungan strategis yang melingkupinya (Yin, 2018; Creswell & Poth, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling*, terdiri atas perwira dan prajurit TNI AD yang memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan operasi di Papua (Sugiyono, 2015). Data juga diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap regulasi, kebijakan pertahanan, doktrin militer, serta dokumen strategis yang relevan, didukung studi pustaka dan observasi non-partisipatif untuk memperkuat konteks analisis (Riduwan, 2013; Suharsaputra, 2012). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan kerangka Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, dengan keabsahan data dijamin melalui uji kredibilitas dan teknik triangulasi sumber serta metode (Miles et al., 2014).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi TNI Angkatan Darat dalam Menghadapi Insurjensi di Papua

Berdasarkan hasil pengumpulan data, strategi TNI Angkatan Darat (TNI AD) dalam menghadapi insurjensi di Papua diarahkan pada pendekatan *Smart Power*, yaitu penggabungan tindakan keamanan bersenjata dengan pendekatan teritorial dan sosial kemasyarakatan. Strategi ini diterapkan sebagai respons terhadap karakter ancaman yang bersifat asimetris, di mana kelompok bersenjata tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga memanfaatkan medan geografis, propaganda politik, dan dukungan sosial di tingkat lokal (Galula, 1964). Dalam implementasinya, TNI AD menjalankan operasi terintegrasi yang memadukan penindakan langsung terhadap kelompok separatis dengan kegiatan pembinaan teritorial untuk memenangkan kepercayaan masyarakat (*winning hearts and minds*). Optimalisasi intelijen manusia (HUMINT) melalui aparat teritorial menjadi kunci dalam mendeteksi dini pergerakan kelompok bersenjata serta memisahkan kombatan dari warga sipil. Strategi ini menunjukkan bahwa keberhasilan operasi kontra-insurjensi tidak semata ditentukan oleh superioritas militer, melainkan oleh presisi intelijen dan penerimaan masyarakat terhadap kehadiran negara (Prayitno et al., 2019).

Kendala TNI Angkatan Darat dalam Menghadapi Insurjensi di Papua

Hasil penelitian juga mengidentifikasi berbagai kendala signifikan yang dihadapi TNI AD dalam pelaksanaan operasi kontra-insurjensi di Papua. Kendala utama berasal dari kondisi geografis ekstrem, seperti pegunungan terjal, hutan lebat, serta keterbatasan infrastruktur transportasi, yang menghambat mobilisasi pasukan dan distribusi logistik. Ketergantungan pada jalur udara menjadikan operasi sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, khususnya dalam pengiriman logistik dan evakuasi medis (Komnas HAM RI, 2022). Selain faktor geografis, kendala taktis muncul dari pola pergerakan kelompok bersenjata yang menerapkan strategi gerilya dan sering memanfaatkan warga sipil sebagai tameng. Situasi ini menimbulkan dilema serius dalam penerapan *rules of engagement*, karena setiap tindakan harus dilakukan secara presisi untuk menghindari korban sipil dan tekanan politik di tingkat nasional maupun internasional. Hambatan komunikasi akibat kondisi medan juga memperbesar risiko gangguan koordinasi antar-unit, sehingga menuntut tingkat kesiapsiagaan dan adaptasi yang sangat tinggi di lapangan (Budi & Anwar, 2021).

Rencana Strategi TNI AD melalui Penerapan Pos Depan Taktis Gabungan (PDTG)

Sebagai respons terhadap dinamika ancaman dan kendala operasional di Papua, TNI AD merencanakan penerapan Pos Depan Taktis Gabungan (PDTG) sebagai instrumen strategis dalam operasi kontra-insurjensi. Konsep PDTG dirancang untuk mengubah pola pertahanan dari bersifat statis menjadi kehadiran aktif (*active presence*) di wilayah rawan, dengan mengintegrasikan unsur tempur, intelijen, dan teritorial dalam satu komando taktis. Penerapan PDTG memungkinkan peningkatan interoperabilitas dan percepatan alur informasi intelijen, sehingga setiap potensi ancaman dapat dideteksi dan direspons secara lebih cepat dan terukur. Selain fungsi keamanan, PDTG juga berperan sebagai sarana penguatan pendekatan teritorial melalui pelayanan sosial dasar kepada masyarakat sekitar pos, yang bertujuan mempersempit ruang dukungan terhadap kelompok separatis. Namun demikian, efektivitas PDTG sangat bergantung pada kesiapan logistik, sistem komunikasi yang andal, serta kemampuan mengelola potensi egosektoral antar satuan yang tergabung di dalam pos gabungan (U.S. Department of Defense, 2010).

Transformasi Strategi melalui Pendekatan *Smart Power*

Pengolahan data menunjukkan bahwa strategi TNI Angkatan Darat mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan militer konvensional menuju penerapan *Smart Power*, yaitu integrasi Hard Power dan Soft Power secara simultan. Penindakan bersenjata terhadap kelompok separatis dilakukan secara selektif, terukur, dan berbasis intelijen, sementara pendekatan non-kinetik diwujudkan melalui Operasi Bakti TNI untuk membangun kepercayaan masyarakat di wilayah konflik. Strategi ini mencerminkan pola kontra-insurgensi kontemporer yang tidak hanya berorientasi pada penghancuran kekuatan fisik lawan, tetapi juga pada pelemahan basis dukungan sosial insurjen (Galula, 1964; Kilcullen, 2010). Pendekatan *Smart Power* tersebut selaras dengan prinsip kontra-insurgensi modern yang menekankan pentingnya memenangkan dukungan masyarakat (*winning hearts and minds*) sebagai faktor penentu keberhasilan jangka panjang. Dalam konteks Papua, kombinasi ketegasan keamanan dan pendekatan kesejahteraan dipahami sebagai strategi adaptif untuk mengelola konflik asimetris secara berkelanjutan, dibandingkan pendekatan militeristik murni yang berpotensi memperluas resistensi sosial (Galula, 1964; Kaldor, 2012).

Penerapan Pos Depan Taktis Gabungan (PDTG)

Data hasil pengolahan menunjukkan bahwa penerapan Pos Depan Taktis Gabungan (PDTG) merupakan inovasi taktis untuk mengatasi kerentanan pos-pos statis di wilayah rawan insurgensi. PDTG menyatukan unsur tempur, intelijen, dan teritorial dalam satu komando lapangan, sehingga pola operasi tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif melalui dominasi wilayah aktif (*area domination*). Konsep ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pertahanan pasif menuju kehadiran aktif negara di wilayah konflik (U.S. Department of Defense, 2010). Integrasi fungsi dalam PDTG mempercepat alur pengumpulan dan distribusi informasi intelijen, sehingga memungkinkan tindakan preventif sebelum ancaman berkembang menjadi eskalasi konflik terbuka. Model ini sejalan dengan doktrin operasi gabungan modern yang menekankan interoperabilitas lintas fungsi, kecepatan pengambilan keputusan, serta kesatuan komando sebagai prasyarat efektivitas operasi di medan perang asimetris (U.S. Department of Defense, 2010; Joint Chiefs of Staff, 2018).

Optimalisasi Intelijen Teritorial dan Adaptasi Postur

Hasil pengolahan data menegaskan bahwa keberhasilan operasi kontra-insurgensi sangat bergantung pada optimalisasi intelijen manusia (HUMINT) melalui aparat teritorial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat adat. Kedekatan sosial ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi ancaman serta pemisahan yang lebih presisi antara kombatan dan warga sipil, yang merupakan elemen krusial dalam operasi militer di lingkungan konflik internal (Prayitno et al., 2019; Kilcullen, 2010). Selain itu, fungsi intelijen diperkuat melalui operasi psikologis untuk menekan propaganda separatis serta adaptasi postur pertahanan melalui pembangunan pos-pos baru di wilayah rawan. Penyesuaian postur ini bertujuan memperpendek rentang kendali komando dan meningkatkan kecepatan respons terhadap gangguan keamanan, sehingga kehadiran negara dapat dirasakan lebih nyata dan berkelanjutan di tingkat lokal (Prayitno et al., 2019; TNI AD, 2020).

Mitigasi Kendala Geografis dan Risiko Operasional

Analisis data menunjukkan bahwa tantangan geografis ekstrem dan ketergantungan pada logistik udara merupakan faktor risiko utama dalam operasi kontra-insurgensi di Papua. Medan pegunungan, cuaca yang tidak menentu, serta keterbatasan akses darat secara langsung memengaruhi keberlanjutan suplai logistik, mobilitas pasukan, dan proses evakuasi medis, sehingga menuntut manajemen risiko operasional yang ketat (Bappenas, 2021; International

Crisis Group, 2023). Selain faktor geografis, penggunaan warga sipil sebagai tameng oleh kelompok insurjen menciptakan dilema serius dalam penerapan aturan pelibatan (*Rules of Engagement*). Kondisi ini menempatkan presisi intelijen sebagai prasyarat mutlak untuk mencegah jatuhnya korban non-kombatan serta menghindari tekanan politik dan internasional terkait isu hak asasi manusia (Komnas HAM RI, 2022; Amnesty International, 2020).

Egosektoral Antar Satuan

Temuan lain dari pengolahan data menunjukkan adanya hambatan egosektoral antar satuan yang tergabung dalam struktur PDTG. Perbedaan doktrin, prosedur tetap, serta klaim kepemimpinan di tingkat taktis berpotensi memperlambat pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas koordinasi, terutama dalam situasi kontak bersenjata yang menuntut respons cepat dan terpadu (Joint Chiefs of Staff, 2018). Selain hambatan struktural, aspek psikologis berupa rendahnya tingkat kepercayaan antar personel lintas satuan juga memengaruhi kinerja operasi gabungan. Kondisi ini menuntut mitigasi berkelanjutan melalui latihan gabungan, pembiasaan kerja lintas satuan, serta penyusunan protap terpadu agar sinergi PDTG dapat berjalan optimal dan konsisten dalam jangka panjang (U.S. Department of Defense, 2010). Berdasarkan pemaparan di atas, strategi TNI Angkatan Darat dalam menghadapi insurjensi di Papua telah bergerak menuju paradigma kontra-insurjensi modern yang adaptif dan multidimensional. Pendekatan *Smart Power* menempatkan kekuatan militer dan kesejahteraan masyarakat sebagai dua instrumen yang saling melengkapi, sehingga keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari kemenangan tempur, tetapi dari kemampuan negara membangun legitimasi di mata masyarakat lokal. Dalam dimensi taktis, penerapan PDTG terbukti menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan pos statis dan memperkuat dominasi wilayah secara aktif. Integrasi unsur tempur, intelijen, dan teritorial mempercepat siklus deteksi-respon ancaman serta mempersempit ruang gerak kelompok separatis. Namun demikian, efektivitas strategi ini tetap dipengaruhi oleh tantangan struktural berupa kondisi geografis ekstrem, ketergantungan logistik udara, serta risiko pelanggaran HAM akibat kompleksitas medan konflik.

Pembahasan

Operasi kontra-insurjensi (COIN) di Papua menuntut interoperabilitas TNI AD yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga organisasi dan doktrinal. Dalam konteks medan ekstrem (hutan lebat, pegunungan, akses terbatas), interoperabilitas menjadi prasyarat agar unsur tempur, intelijen, teritorial, dan dukungan logistik dapat bekerja terpadu melalui kesamaan prosedur, kecepatan pertukaran informasi, serta komando dan kendali yang sinkron. Karena COIN pada dasarnya adalah kompetisi legitimasi di ruang sosial, efektivitas operasi tidak cukup diukur dari keberhasilan tempur semata, melainkan dari kemampuan mengisolasi insurjen dari dukungan masyarakat dengan kombinasi pendekatan keras dan lunak (Prayitno, Rudiyanto, & Rusdin, 2019). Temuan pembahasan menunjukkan bahwa strategi TNI AD cenderung bergerak ke pola hibrida: penindakan selektif berbasis intelijen dipadukan dengan pembinaan teritorial untuk membangun kepercayaan publik, sejalan dengan arah kebijakan yang menekankan pendekatan *people-centric* dalam penanganan konflik (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2025; Zulfikar, 2024). Di level taktis, pengembangan Pos Depan Taktis Gabungan (PDTG) dipahami sebagai adaptasi konsep pangkalan operasi depan/FOB yang memperpendek rantai komando, mendekatkan dukungan medis-logistik, dan mempercepat respons saat kontak tembak. Namun efektivitas interoperabilitas masih dipengaruhi kendala klasik: keterbatasan anggaran/personel/sarana, hambatan komunikasi dan logistik akibat cuaca-medan, serta problem *egosektoral* yang

mengganggu *trust* dan sinkronisasi protap lintas satuan. Karena itu, penguatan interoperabilitas perlu diarahkan pada standarisasi protap gabungan, latihan terpadu berulang (CPX/FTX), serta penguatan sistem komunikasi dan dukungan logistik yang kompatibel dengan karakter wilayah operasi (TNI AD, 2020; Tippe, 2017). Sebagai dasar perumusan strategi pengembangan PDTG, analisis SWOT/TOWS digunakan untuk memetakan faktor internal-eksternal agar strategi dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang sekaligus menekan kelemahan serta ancaman secara sistematis (Rangkuti, 2008). Hasil pemetaan menegaskan bahwa peluang (percepatan pembangunan dan dukungan tokoh lokal) dapat menjadi pengungkit strategi COIN jika ditopang interoperabilitas yang kuat; sebaliknya, ancaman (egosektoral, minim sarpras, akses transport terbatas) akan terus menggerus efektivitas jika tidak ditangani melalui doktrin gabungan, latihan lintas satuan, dan kebijakan dukungan sumber daya yang konsisten.

Tabel 3. Menentukan Strategi SO, ST, WO & WT

INTERNAL EKSTERNAL	STRENGTH	WEAKNESS
		<ol style="list-style-type: none"> Dukungan dari Pimpinan Negara dan TNI AD Nilai kejuangan pers TNI AD yang cukup kuat tertanam dalam diri pada personel yang bertugas di Papua (Kab Nduga). Kekuatan gelar satuan TNI AD di Papua (Kab Nduga)
OPPORTUNITY	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<ol style="list-style-type: none"> Keberhasilan percepatan pembangunan melalui program Otonomi Khusus. Keterlibatan tokoh lokal memberi nilai strategis 	Memberdayakan satuan TNI AD dalam melaksanakan Operasi kontra insurjensi dengan memanfaatkan sektor pembangunan dan peretumbuhan ekonomi serta kolaborasi dengan tokoh lokal Papua.	Mengotimalkan kemampuan satuan TNI AD dalam upaya menghadapi ancaman separatisme dengan mengajukan anggaran yang mencukupi dan penambahan jumlah personel dihadapkan pada luas wilayah dan intensitas kegiatan operasi kontra insurjensi di Papua khususnya Kabupaten Nduga.
THREATS	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<ol style="list-style-type: none"> Ego Sektoral antar satuan TNI AD. Keterbatasan penguasaan medan operasi. Minim Sarana Prasarana Akses transportasi terbatas 	Mewujudkan pendidikan dan latihan antar fungsi dan satuan TNI AD guna meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam menangani persoalan separatisme dengan mengesampingkan ego sektoral dalam rangka kontra insurjensi di Papua khususnya Kabupaten Nduga.	Mengotimalkan kemampuan satuan TNI AD dalam menjalin koordinasi dan komunikasi antar satuan dan instansi lain guna menanggulangi separatisme dengan mengesampingkan ego sektoral

Tabel 4. Menentukan Strategi Maxi-Maxi, Maxi-Mini, Mini-Maxi dan Mini-Mini

INTERNAL	STRENGTH	WEAKNESS
		<ol style="list-style-type: none"> Dukungan dari Pimpinan Negara dan TNI AD. Nilai kejuangan pers TNI AD yang cukup kuat tertanam dalam diri pada

EKSTERNAL	personel yang bertugas di Papua (Kab Nduga). 3. Kekuatan gelar satuan TNI AD di Papua (Kab Nduga)	bentang alam. 3. Keterbatasan Sarana Prasana PDTG.
OPPORTUNITY 1. Keberhasilan percepatan pembangunan melalui program Otonomi Khusus. 2. Keterlibatan tokoh lokal memberi nilai strategis	STRATEGI MAXI-MAXI Memberdayakan Satuan TNI AD dalam melaksanakan Operasi kontra insurjensi dengan memanfaatkan sektor pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang baik dalam rangka penanggulangan separatisme di Papua khususnya Kabupaten Nduga.	STRATEGI MINI-MAXI Mengotimalkan kemampuan personel TNI/Polri dalam menanggulangi separatisme dengan mengajukan anggaran yang mencukupi dan penambahan jumlah personel dihadapkan pada luas wilayah dan intensitas kegiatan operasi kontra insurjensi di Papua khususnya Kabupaten Nduga.
THREATS 1. Ego Sektoral antar satuan TNI AD. 2. Keterbatasan penguasaan medan operasi. 3. Minim Sarana Prasarana. 4. Akses transportasi terbatas.	STRATEGI MAXI-MINI Mewujudkan pendidikan dan latihan antar fungsi dan satuan TNI AD guna meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam menangani persoalan separatisme dengan mengesampingkan ego sektoral dalam rangka kontra insurjensi di Papua khususnya Kabupaten Nduga.	STRATEGI MINI-MINI Mengotimalkan kemampuan satuan TNI AD dalam menjalin koordinasi dan komunikasi antar satuan dan instansi lain guna menanggulangi separatisme dengan mengesampingkan ego sektoral.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kajian menjelaskan strategi TNI AD, mengidentifikasi kendala utama, serta menilai relevansi PDTG dalam operasi kontra-insurjensi di Papua dapat dijawab secara ringkas. Strategi TNI AD terbukti bergerak dari pola konvensional menuju pendekatan adaptif terhadap perang asimetris melalui *Smart Power*, yakni integrasi *Hard Power* (penindakan selektif berbasis intelijen dan aturan pelibatan) dan *Soft Power* (pembinaan teritorial, operasi bakti, dan komunikasi sosial) untuk memperkuat legitimasi negara dan memutus dukungan sosial insurjen melalui *winning hearts and minds*. Selain itu, pengembangan Pos Depan Taktis Gabungan (PDTG) dipahami sebagai penguatan kehadiran negara di garis depan sekaligus simpul integrasi unsur tempur–telijen–teritorial, sehingga informasi lapangan dapat lebih cepat dikonversi menjadi tindakan taktis yang presisi. Penelitian juga menegaskan bahwa hambatan operasi bersifat multidimensi dan saling terkait. Kendala geografis dan cuaca ekstrem memperberat mobilitas, memperbesar ketergantungan pada logistik udara, serta menimbulkan risiko pada rantai pasok dan evakuasi medis ketika cuaca dan ancaman mengganggu jalur udara. Di sisi komando- kendali, *blank spot* komunikasi dan ketidakmerataan dukungan teknologi berpotensi memperlambat respons. Dilema aturan pelibatan akibat penggunaan warga sipil sebagai tameng menuntut presisi intelijen tinggi untuk mencegah *collateral damage* dan dampak politik. Hambatan egosektoral lintas satuan perbedaan protap/doktrin serta rendahnya *trust* juga dapat melemahkan interoperabilitas bila tidak dimitigasi. Karena itu, efektivitas PDTG sangat ditentukan oleh prasyarat pendukung: dukungan logistik yang konsisten, komunikasi yang andal dan aman, standarisasi protap gabungan sejak awal, serta latihan gabungan berulang untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas satuan.

DAFTAR PUSTAKA

Andani, R., & Alsodiq. (2022). Analisis perspektif pemberontakan dan kontra- pemberontakan dalam menjaga pertahanan negara. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(5), 1600–1607. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i5.2022.1600-1607>

- Armawi, A. (2019). Eksistensi TNI dalam menghadapi ancaman militer dan nir militer multidimensional di era milenial. *Wira Edisi Khusus 2019* (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia).
- Bala, B., & Tar, U. A. (2021). Regional cooperation in West Africa: Counter terrorism and counter-insurgency. *African Security*. <https://doi.org/10.1080/19392206.2021.1929747>
- Bulloch, G. (1996). The application of military doctrine to counter insurgency (COIN) operations – A British perspective. *Small Wars & Insurgencies*, 7(2), 165–177. <https://doi.org/10.1080/09592319608423140>
- Chalk, P. (2023). *Southeast Asian Terrorism and Counterterrorism: Assessing Threats and Responses*. RAND Corporation.
- Cordesman, A. H. (2023). *The Changing Nature of Insurgency and Counterinsurgency Strategies*. Center for Strategic and International Studies.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE.
- Cronin, A. K. (2023). *How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Insurgent Movements*. Princeton University Press.
- Finlan, A., Danielsson, A., & Lundqvist, S. (2021). Critically engaging the concept of joint operations: Origins, reflexivity and the case of Sweden. *Defence Studies*, 21(3), 356–374. <https://doi.org/10.1080/14702436.2021.1932476>
- Foster, N. R. A. (2005). Changing the army for counterinsurgency operations. *Military Review*, November–December, 27–37.
- Galula, D. (1964). *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*. Praeger Security International.
- Hoffman, F. G. (2009). *Hybrid Warfare and Challenges for 21st Century Warfare*. Potomac Books. Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC). (2023).
- Jones, S. G. (2008). *Counterinsurgency in Afghanistan*. RAND Corporation.
- Jones, S. G. (2023). *Counterinsurgency and the Changing Nature of Warfare in Asia*. Oxford University Press.
- Kemhan. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Press.
- Kilcullen, D. (2009). *The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big One*. Oxford University Press.
- Kilcullen, D. (2022). *The Dragons and the Snakes: How the Rest Learned to Fight the West*. Oxford University Press.
- Kurnianto, T. A., Santoso, P., & Utama, A. P. (2022). Upaya Indonesia mencegah konflik Papua dengan pendekatan mediasi humanistik. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(2), 149–162.
- Liow, J. C. (2022). *The Politics of Indonesia's Jihadists: Resilience and Adaptation in a Changing Security Landscape*. Cambridge University Press.
- Mansoor, P. R. (2023). *Surge: My Journey with General David Petraeus and the Remaking of the Iraq War*. Yale University Press.
- Mao, Z. (1937). *On Guerrilla Warfare*. Foreign Languages Press.
- Mella, S. N., Cempaka Timur, F. G., & Widodo, P. (2023). Analisis kapabilitas efektif guna melaksanakan operasi militer dalam kontra insurjensi di wilayah Papua. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(2), 225–2583.
- Metz, S., & Millen, R. (2004). *Insurgency and Counterinsurgency in the 21st Century: Reconceptualizing Threat and Response*. Strategic Studies Institute.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE.

- Piatakov, A. N., & Kodzoev, M. A.-M. (2023). US “Outposts” in Latin America: Military- technical cooperation, military bases and joint exercises. *Vestnik RUDN. International Relations*, 23(3), 518–535. <https://doi.org/10.22363/2313-0660-2023-23-3-518-535>
- Prameswari, S. S., & Husna, N. A. (2022). Insurgency, counterinsurgency and human security: A case study of armed violence in Papua during the COVID-19 pandemic. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1). <https://doi.org/10.18196/jhi.v11i1.12558>
- Prayitno, A., Rudiyanto, & Rusdin. (2019). *Strategi bersaing: Dalam perspektif militer dan bisnis*. Alfabeta.
- Rabasa, A., & Chalk, P. (2022). *The Military and Insurgency: Joint Operations in Southeast Asia*. RAND Corporation.
- Rangkuti, F. (2008). *Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- TNI Angkatan Darat. (2020). *Doktrin Kartika Eka Paksi TNI Angkatan Darat Tahun 2020*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.